

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara multicultural dan multietnis. Di Indonesia diperkirakan terdapat 931 suku bangsa dengan 731 bahasa. Adapun kelompok etnis di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Minangkabau, Batak, Dayak, Bugis dan Cina. Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki tradisi religi atau keagamaan yang cukup kuat. Ada lima agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Syam, 2015). Memiliki keberagaman tidak hanya membuat Indonesia menjadi Negara yang indah akan tetapi juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap mereka yang minoritas. Di Indonesia sendiri, tindakan diskriminasi biasanya karena kecemburuan sosial yang kemudian menjadi tindakan anarki yang berujung pada kekerasan sehingga menjadi konflik (Zamroni, 2019).

Kota Medan merupakan salah satu kota yang sebagian dihuni oleh etnis Tionghoa yang merupakan kota perdagangan. Keberadaan etnis Tionghoa di kota Medan bervariasi dan juga dalam jangka kurun waktu yang berbeda. Gelombang pertama dimulai pada abad ke-15, ketika armada perdagangan Tiongkok datang mengunjungi pelabuhan Sumatera Timur dan melakukan hubungan dagang dengan sistem barter. Hubungan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga sebagian para pedagang tersebut ada yang menetap di Sumatera Timur.

Gelombang kedua berlangsung pada tahun 1863. Pada saat itu, Belanda mulai bergerak di bidang perkebunan tembakau. Usaha ini terus berkembang, tenaga kerja yang cukup banyak juga semakin dibutuhkan. Pihak Belanda merasa tidak cocok dengan buruh Pribumi. Karena itu, pengusaha perkebunan mencoba mendatangkan tenaga kerja dari negeri Tiongkok. Pada abad ke 19, dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda dan kaum pengusaha di tanah Deli, orang Tionghoa dapat memonopoli seluruh sektor pengangkutan di kawasan tanah Deli. Banyak pemilik perkebunan yang memberi kesempatan pada orang Tionghoa untuk menjadi penyalur bahan makanan dan bekerja sebagai kontraktor di perkebunan.

Sehingga kehidupan ekonomi etnis Tionghoa mulai meningkat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan mencolok antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Pribumi. Kemudian, etnis Tionghoa yang mulai mempunyai ekonomi yang meningkat ini mendatangkan isteri, anggota keluarga dan kerabatnya di negara Tiongkok dengan kapal (pada saat itu transportasi kapal sudah ada). Kedatangan mereka dari berbagai sub etnik menyebabkan mereka berkumpul di antara mereka sendiri, membuat perkampungan sendiri, memakai bahasa sendiri. Inilah titik awal eksklusivime orang Tionghoa. (Warganda, 2018)

Perkembangan masyarakatnya yang beragam menjadikan kota tersebut memiliki pola pemukiman yang berkelompok. Kota Medan memperlihatkan proses penguatan rasa kesatuan etnik sebagai suatu komunitas baru. Dalam hal ini, setiap kelompok etnik mempergunakan

norma, aturan serta ideologi tradisional daerah asal mereka, sehingga terjadilah suatu proses penguatan ikatan primordial pada setiap kelompok etnik. Setiap etnis tersebut mulai membentuk gaya hidup masing-masing sehingga bersikap eksklusif antara satu dengan yang lain. (Warganda, 2018)

Tionghoa adalah salah satu dari sekian banyaknya suku bangsa yang datang dan menetap di Indonesia. Kedatangan mereka tentu bukan sekedar untuk mencari nafkah, namun secara tidak langsung mereka juga membawa kebudayaannya dan bahkan menyebarkan agamanya. Sehingga membuat Indonesia semakin beragam dan kaya akan budaya, baik bahasa, adat istiadat dan juga agama (Muzakky, 2016). Tionghoa sebagai etnis yang memiliki perbedaan dengan pribumi dalam hal agama dan budaya yang berdampak pada asimilasi yang terjadi antara Tionghoa dengan pribumi yang membutuhkan perjuangan panjang. Perbedaan budaya dan agama yang terjadi membuat pemerintah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mencampurkan etnis Tionghoa dengan pribumi. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan dan menjadi kebijakan pro dan kontra di kalangan etnis Tionghoa adalah kebijakan asimilasi yang dirancang pemerintah Orde Baru (Zamroni, 2019).

Di era pasca kemerdekaan Indonesia, peristiwa Gerakan 30 S/PKI yang terjadi pada 30 September 1965 menjadi sebuah catatan buruk bagi sejarah hubungan Indonesia-Tiongkok. Pasalnya, akibat peristiwa ini telah menimbulkan kekerasan anti-komunis yang berubah menjadi gerakan anti-Tiongkok yang kuat dan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik pada 30 Oktober 1967. Ketika itu, Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan kestabilan negara Indonesia. Akibat tuduhan bahwa Tiongkok ikut juga berperan dalam tragedi G 30 S/PKI, yang ditandai dengan adanya senjata PKI yang diduga di selundupkan melalui Tiongkok yang disebut sebagai angkatan ke lima. Hal ini tentu ikut menyulut kemarahan rakyat Indonesia, sehingga apapun yang berhubungan dengan Tiongkok akan selalu diidentikan dengan ancaman komunis. Puncak penolakan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pun terjadi ketika pemerintahan Orde Baru. (Hasanah, 2019)

Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam jangka waktu 1996 sampai 1998 yang menggantikan Presiden sebelumnya yaitu Presiden Soekarno. Masa ini merupakan masa gelap bagi etnis Tionghoa karena pada masa ini banyak kebijakan anti Tionghoa yang dikeluarkan oleh pemerintah (Tarigan, 2016). Hal ini ditandai dengan adanya peraturan tentang pelarangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tionghoa yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967. Selain itu, juga terdapat aturan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa harus mengubah nama Tionghoa menjadi nama yang berbau Indonesia. Peraturan ini juga tertuang dalam Surat Edaran No.06/Preskab/6/67. Akibat dari kebijakan tersebut membuat etnis Tionghoa dipaksa untuk berasimilasi dan melepaskan identitas mereka. Adanya peraturan-peraturan tersebut juga menambah jajaran sikap anti-Tionghoa saat itu. Sehingga, akibat pembekuan hubungan diplomatik dan sikap orde baru terhadap masyarakat Tionghoa ketika itu, membuat hubungan Indonesia-Tionghoa sangat buruk (Hasanah, 2019)

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa Orde Baru malah membuat akses yang diberikan pemerintah oleh etnis Tionghoa semakin berbau keterasingan dan terbatas

baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Akibatnya etnis Tionghoa merasa jauh dan terasingkan dari kebudayaannya selama ini yang menjadi identitas mereka. Keterasingan etnis Tionghoa ini terjadi karena adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan. Pembatasan inilah yang menjadi awal munculnya istilah “benteng” antara etnis Tionghoa dengan Negara dan pribumi. Rasa tidak aman yang dirasakan etnis Tionghoa terhadap Negara dan pribumi kemudian disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya sifat etnis Tionghoa yang tertutup atau memisahkan diri dari yang lain dibandingkan dengan etnis lainnya. Eksklusivitas ini kemudian menjadi pola hidup dan kebiasaan, bahkan menjadi budaya bagi beberapa lapisan etnis Tionghoa itu sendiri (Andrie, 2016).

Era Orde Baru memang sangat diskriminatif dan restriktif atau membatasi bagi etnis Tionghoa dalam berbagai bidang. Proses pembaharuan yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Pribumi diharapkan dapat membawa keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Namun pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, pada masa Orde Baru terjadi sentimen anti Tionghoa yang menimbulkan kekerasan seperti yang terjadi pada akhir kekuasaan Soeharto pada Mei 1998 (Satria, 2022). Pada Mei 1998 kerusuhan anti-Tionghoa kembali terjadi yang disebabkan oleh laju inflasi besar-besaran dan membawa ekonomi Indonesia terpuruk pada saat itu. Sentiment anti-Tionghoa pun kembali terjadi yang menyebabkan etnis Tionghoa sebagai kambing hitam yang akhirnya menyebabkan etnis Tionghoa diserang oleh orang-orang pribumi. Harta benda seperti toko-toko milik etnis Tionghoa dijarah, dirampok dan dibakar, kemudian banyak perempuan Tionghoa diperkosa (Fitrya & Purwaningsih, 2013).

Kerusuhan anti-Tionghoa juga terjadi di Kota Medan yang berawal dari aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis. Gerakan ini ditandai dengan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu mengatasi krisis moneter yang semakin parah. Krisis ekonomi yang melanda kota Medan memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan pekerja atau buruh. Ketidakstabilan ekonomi mempengaruhi kebutuhan para pekerja yang tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Akibatnya, para pekerja mengambil tindakan. Tak hanya itu, mahasiswa kota Medan juga menggelar unjuk rasa.

Gerakan aksi ini kemudian merebak menjadi gerakan aksi kerusuhan massa. Kerusuhan itu terjadi dari tanggal 4 Mei sampai 7 Mei 1998. rangkaian peristiwa mulai dari penjarahan dan pembakaran toko-toko di beberapa daerah pusat keramaian di kota Medan antara lain di daerah Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Aksara, hingga daerah Mandala. Serta terjadinya kerusuhan di jalan-jalan protokol di kota Medan seperti di jalan Brigjen. Katamsa, Marendal, Pajak Simpang Limun, Jalan Asia sampai jalan Sutrisno (Hidayatullah, 2020).

Terkait dengan Tionghoa Muslim pada tahun 1998 mereka yang sudah diketahui sebagai Muslim akan diperlakukan sepenuhnya sebagai bagian dari etnik mayoritas. Banyak dari etnik Tionghoa yang membuat tulisan di depan toko toko mereka yang ditulis dengan kata “Milik Pribumi”, “Milik Muslim” untuk dapat mengamankan properti mereka dari penjarahan dan pembakaran. Namun, beberapa Tionghoa Muslim pemilik Toko mengatakan bahwa mereka juga merasakan sasaran tersebut, meskipun mereka menyebutkan bahwa mereka adalah

Muslim. Ternyata masih ada pertanyaan apakah mereka muslim “Pribumi” atau Muslim “nonpribumi”. (Sabrina, 2021)

Keberadaan masyarakat Tionghoa Islam jumlahnya sangat sedikit dibandingkan Tionghoa yang masih beragama Budha dan Kristen. Di kota Medan, pada umumnya orang Tionghoa memeluk agama Budha sebagai agama dari leluhur mereka. Akan tetapi, ada juga yang memeluk agama Islam sebagai agama yang mereka percayai. Penyampaian ajaran Islam dengan dakwah yang sederhana menjadi penyebab mereka memilih agama Islam dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan adanya akidah, ibadah, akhlak, dan syariat yang ada dalam agama Islam. Selain itu juga terdapat satu organisasi yang menaungi mereka agar mereka bisa tetap bertahan pada agama Islam yang telah mereka pilih sebagai agama yang dapat membimbing mereka. Organisasi itu bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Organisasi ini berdiri, disebabkan adanya suatu kewajiban bagi orang-orang Tionghoa yang terlebih dahulu memeluk agama Islam, menyebarkan agama yang penuh Rahmat ini kepada saudara-saudaranya yang belum memeluk agama Islam.

Menurut salah satu tokoh asimilasi, Junus Jahja, kondisi pasca peristiwa 1965 dalam konteks tertentu merupakan peluang bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia untuk melakukan pembauran. Lebih spesifik lagi, Junus Jahja menganggap bahwa strategi yang paling tepat untuk melakukan pembauran total dengan memeluk agama Islam, karena diakui atau tidak, Islam adalah faktor signifikan pembentuk identitas sosial golongan pribumi Indonesia. Dengan dapat diterima oleh golongan memeluk Islam, diharapkan orang-orang Tionghoa di Indonesia dapat diterima oleh golongan pribumi, karena telah memiliki identitas sosial yang sama, yaitu sesama orang Islam. Dengan demikian, bagi orang-orang Tionghoa yang memeluk Islam, dengan sendirinya status sosial mereka akan menurun mengikuti status sosial penduduk pribumi. Orang-orang etnis Tionghoa yang memutuskan untuk memeluk agama Islam sangat tidak jarang merasa terasing dan tertekan. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif dari keluarganya, bahkan ektrimnya lagi tidak diakui menjadi bagian dari keluarga tersebut. Belum lagi ketika mereka berada dalam lingkungan masyarakat disekitarnya yang masih belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran mereka karena dianggap tetap sama dengan orang-orang etnis Tionghoa lainnya. Mereka menjadi minoritas dalam minoritas etnis Tionghoa yang merupakan bagian minoritas dalam masyarakat Indonesia. Keprihatinan terhadap dilema yang sering dihadapi orang-orang Tionghoa Muslim itulah yang telah mengilhami Haji Yiap Siong dan Haji Karim Oey untuk mendirikan sebuah organisasi yang disebut Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada tahun 1961. (Pahrozi, 2018)

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961 oleh Abdul Karim Oei Tjeng Hien, Abdusomad Yap A Siong dan Kho Goan Tjin. PITI ini merupakan gabungan dari Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang dipimpin oleh Abdusomad Yap A Siong dan Persatuan Muslim Tionghoa (PMT) yang dipimpin oleh Kho Guan Tjin. Sebelum kemerdekaan PIT dan PTM pada awalnya telah didirikan di Medan dan Bengkulu, masing-masing organisasi ini masih bersifat lokal sehingga pada saat itu keberadaan kedua organisasi ini belum begitu dirasakan oleh masyarakat, baik itu muslim Tionghoa maupun muslim Indonesia.

Dengan begitu, untuk merealisasikan perkembangan ukhuwah Islamiyah di kalangan muslim Tionghoa, maka PIT yang berkedudukan di Medan dan PTM yang berkedudukan di Bengkulu merelakan diri pindah ke Jakarta, dengan bergabung dalam satu wadah yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). PITI ini didirikan pada waktu itu sebagai tanggapan realistis atas saran dari ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu K.H. Ibrahim kepada Abdul Karim Oei, bahwa untuk menyampaikan agama Islam kepada etnis Tionghoa, harus dilakukan oleh etnis Tionghoa yang beragama Islam.

Dalam sejarah keorganisasinya, pada tahun 1960-1970-an, khususnya setelah terjadinya Gerakan 30 September (G-30S/PKI) ketika Indonesia sedang menggalakkan gerakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan pembatasan atau dilarangnya simbol-simbol atau identitas yang bersifat disosiatif atau menghambat pembauran, seperti istilah, bahasa dan budaya asing khususnya Tionghoa oleh pemerintah, dan PITI terkena dampaknya. Sehingga nama Tionghoa pada kepanjangan PITI dilarang. Maka pada tanggal 15 Desember 1972 pengurus PITI mengubah kepanjangan PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. (Sriyanto, 2013)

Pada era reformasi tahun 1998 telah membawa angin segar bagi etnis Tionghoa. Pada masa Presiden B.J. Habibie, sejak bulan Juni 1998, istilah Tionghoa kembali digunakan dan istilah pribumi dan non-pribumi dihapuskan. Kemudian, peralihan pemerintahan presiden selanjutnya ada indikasi pendekatan pluralismenya dengan menghilangkan dan meredakan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis Tionghoa dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang memberikan kebebasan kepada etnis Tionghoa (Sabrina, 2021). Sosok presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan sosok figur paling berjasa bagi etnis Tionghoa Indonesia dengan diterbitkannya Kepres No 6/2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang di dalamnya berisi tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres Presiden Soeharto berisi tentang pelarangan ekspresi serta kepercayaan orang Tionghoa di depan umum. Hal itu membuat Tionghoa di Indonesia seperti tidak diakui. Dewasa ini, komunitas Tionghoa sudah merasa lega karena pada era reformasi mereka mendapat perlindungan hukum yang sangat kuat atas status kewarganegaraannya. (Kurniawan, 2021). Perkembangan selanjutnya, dengan adanya perubahan zaman masa reformasi, pada bulan Mei 2000 rapat pimpinan organisasi menetapkan kembali kepanjangan PITI menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (Sriyanto, 2013). Nama organisasi ini kembali menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dikarenakan para anggota ingin menunjukkan identitas diri mereka sebagai etnis Tionghoa yang telah menganut agama Islam.

Identitas etnis Tionghoa yang serba salah dari masa ke masa hingga Orde Baru diharapkan dapat diubah pada masa Reformasi. Dimana para penguasa telah mampu memahami dan memaknai perbedaan itu sendiri, salah satunya adalah Susilo Bambang Yudhyono dalam pidatonya tahun 2009 yang mengingatkan bahwa semboyan Bhineka Tunggal Ika dimaknai sebagai kesatuan tapi bukan persamaan, persatuan tapi bukan keseragaman. Maka dari pernyataan tersebut diharapkan etnis Tionghoa dapat menemukan identitasnya sendiri, mereka dapat membentuk identitasnya sendiri yang selama ini dikekang bahkan harus dipribumikan oleh penguasa. Peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi memberikan catatan diri dalam pencarian identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Penderitaan

akibat kerusuhan Mei 1998 akhirnya terobati ketika pemerintah baru mulai mengakui keberadaan masyarakat Tionghoa dan praktik budayanya di Indonesia. Beberapa peraturan diskriminatif telah dihapuskan, dan sejak saat itu orang Indonesia Tionghoa lebih berani dalam mengekspresikan identitas dan budayanya. Iklim kebebasan disambut baik dengan berdirinya banyak organisasi yang diprakarsai oleh orang Tionghoa, baik berupa partai politik maupun lembaga independen (Sihombing, 2014).

Pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 merupakan kebebasan ekspresi individu yang berimplikasi pada munculnya organisasi sosial baru atau pengaktifan kembali institusi sosial yang tertindas pada masa orde baru. Munculnya ormas-ormas tersebut dibentuk berdasarkan segmentasi tertentu, misalnya suku, agama, asal daerah, bahkan preferensi minat dan hobi. Salah satu yang aktif kembali adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Kehadiran PITI sendiri dapat dilihat sebagai angin segar dalam kehidupan masyarakat. Organisasi ini dibentuk dengan nafas asimilasi dan mengurangi kesenjangan antara etnik Tionghoa dengan masyarakat melalui strategi keagamaan. Bagi para anggota yang berusaha menjadi Jawa dan beragama Islam akan lebih mudah diterima di masyarakat. Meski begitu kehadiran PITI juga bukan tanpa kendala. Muslim Tionghoa dianggap sebagai minoritas di dalam minoritas dalam kelompok etnis Tionghoa. Sehingga keberadaan PITI di Indonesia pada awalnya lebih terfokus pada bantuan mental dan finansial bagi anggota baru, dari pada menyebarkan Islam di masyarakat (Mahaswara, 2017).

Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) didirikan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat Islam dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka *nation building*, yang sesuai dengan cita-cita Revolusi Indonesia. Masuknya etnis Tionghoa dalam agama Islam menunjukkan bahwa telah membantu pemerintah dalam rangka memperkokoh suatu persatuan dan kesatuan, karena telah dianggap telah terlebur secara total. Untuk itu organisasi ini telah memfokuskan kepada etnis Tionghoa untuk memperdalam pembelajaran agama Islam dan sebagai wadah untuk menyebarkan dakwah dikalangan minoritas Tionghoa. Selain itu, PITI juga memiliki tugas untuk menyiapkan kader-kader dakwah yang berasal dari etnis Tionghoa untuk menyebarkan agama Islam di kalangan mereka sendiri. Hal ini untuk menyadarkan kesalahan sejarah yang telah terjadi sebelumnya, bahwa Islam merupakan suatu yang asing bagi etnis Tionghoa dan merupakan agama yang rendah bagi kalangan pribumi. Oleh karena itu, sebagai suatu organisasi Muslim Tionghoa yang terbesar di Indonesia, PITI memainkan peranan yang peting dalam penyebaran agama Islam di etnis Tionghoa maupun sebagai wadah interaksi sosial antara Muslim Tionghoa dengan non Muslim Tionghoa dan etnis Tionghoa dengan masyarakat Pribumi. (Tendean, 2010)

Keberadaan organisasi PITI ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi keberadaan etnis Tionghoa yang beragama Islam dengan penduduk pribumi yang mayoritas Islam dan etnis Tionghoa yang non-Muslim. Organisasi ini juga diharapkan menjadikan etnis Tionghoa Muslim yang tidak terasingkan lagi keberadaannya dan bisa menjadi alat pembauran di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Dari latar belakang peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana proses berjalannya Asimilasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru dari masa transisi (orde lama ke Orde Baru) hingga terjadinya peristiwa Mei 1998, yang menjadi bukti rentannya hubungan sosial dan kultural masyarakat dengan keturunan Tionghoa

(Amanda, 2016). Tulisan ini akan penulis beri judul “Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023”. Tahun 1998 dipilih karena pada tahun ini telah terjadi peristiwa gerakan anti Tionghoa pada masa Orde Baru dan telah adanya organisasi PITI. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran organisasi PITI di kota Medan saat peristiwa itu terjadi. Apakah organisasi PITI berperan serta dalam menyelesaikan konflik antara orang Tionghoa dengan umat muslim lainnya. Hal tersebut guna untuk memperkenalkan Islam Tionghoa untuk mendapat respon positif dari masyarakat.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dikaji dan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam. Maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023”. Tahun 1998 dipilih karena pada tahun ini telah terjadi peristiwa gerakan anti Tionghoa pada masa Orde Baru dan telah adanya organisasi PITI. Dengan lingkup spasial wilayah administrasi Kota Medan dan lingkup temporal periode 1998-2023.

Mengingat perodesasi yang cukup panjang, maka penulis tidak menguraikan perkembangannya secara detail dari setiap tahunnya, namun lebih di tekankan kepada titik fokus yang ditujukan untuk mengetahui Peran Organisasi PITI dalam Perkembangan Muslim Tionghoa saat terjadinya peristiwa pada masa akhir Orde Baru dan sampai sekarang di Kota Medan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah peneliti merumuskan masalah yang lebih fokus, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Kota Medan?
2. Bagaimana Perkembangan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023?

3. Bagaimana Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang dicapai. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui perkembangan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023.
3. Untuk mengetahui peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam membuat karya ilmiah khususnya tentang Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023.
3. Berguna untuk memperbanyak kajian ilmu sejarah terutama tentang Peran Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Perkembangan Muslim Tionghoa di Kota Medan Tahun 1998-2023.
4. Sebagai referensi untuk dijadikan bahan perbandingan dengan hasil penelitian yang ada ataupun berguna bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyajian laporan dan penulisan penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam skripsi ini. Penulis menyusun sistematika penulisan ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Penulisan BAB I, membahas Pendahuluan yang di dalamnya berisi, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Penulisan BAB II, membahas Landasan Teoritis yang di dalamnya berisi tentang, Teori Konseptual yang sesuai dengan judul penelitian, dan Kajian Terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan.

Penulisan BAB III, membahas Metodologi Penelitian yang di dalamnya berisi tentang Metode dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

Penulisan BAB IV, membahas Hasil dan Pembahasan yang di dalamnya berisi hasil-hasil temuan yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian, baik dari studi pustaka, riset lapangan, dan hasil observasi ataupun wawancara.

Penulisan BAB V, menarik sebuah Kesimpulan dan Saran dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, serta memberikan masukan yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN